

## Revitalisasi Nilai Pancasila melalui Penerapan Filosofi UUD 1945: Analisis Hambatan dan Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat (Studi Kualitatif dan SLR)

Linda Ardiya Waroka<sup>1</sup>, Basir Jarah Anilon<sup>2</sup>, Ampun Bantali<sup>4</sup>, Rusli<sup>5</sup>, Fany Rifqoh<sup>6</sup>

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia<sup>1</sup>, Mindanao State University-Albarka Basilan Extension Filipina<sup>2</sup>, Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Indonesia<sup>3</sup>, Institut 'Aisyiyah Sulawesi Selatan, Indonesia<sup>4</sup>, Institut Studi Alquran dan Ilmu Kislaman Sunan Pandanaran, Indonesia<sup>5</sup>

Email: [lindawaroka90@gmail.com](mailto:lindawaroka90@gmail.com)<sup>1</sup>, [basir.anilon@msuamin.edu.ph](mailto:basir.anilon@msuamin.edu.ph)<sup>2</sup>, [ampun.bantali@gmail.com](mailto:ampun.bantali@gmail.com)<sup>4</sup>, [rusli23.mm@gmail.com](mailto:rusli23.mm@gmail.com)<sup>5</sup>, [fanyrifqoh123@gmail.com](mailto:fanyrifqoh123@gmail.com)<sup>6</sup>

Email: [lindawaroka90@gmail.com](mailto:lindawaroka90@gmail.com)

Received : 06-2-2026

Revised : 13-2-2026

Accepted : 17-2-2026



This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).  
Published by Pancasila and Citizenship Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education,  
University of Palangka Raya.

**Abstrak** : Pancasila berfungsi ganda sebagai dasar negara dan pedoman moral yang membentuk interaksi sosial di Indonesia, mencerminkan nilai budaya, sosial, dan politik bangsa. Meski idealnya menjadi landasan kebijakan dan praktik pendidikan, penerapan nilai-nilai Pancasila menghadapi hambatan meningkat akibat polarisasi sosial, ekonomi, dan politik; survei BPS 2023 menunjukkan hanya 45% responden melaporkan menerapkan prinsip Pancasila sehari-hari, mengindikasikan jurang antara idealisme dan praktik. **Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif** dengan desain studi kasus multipel: wawancara mendalam Juli–Agustus dengan tujuh informan purposive (akademisi, praktisi pemerintah, pendidik, tokoh masyarakat, mahasiswa) dianalisis secara tematik, serta Systematic Literature Review (SLR) 2020–2025 yang dilakukan dengan prosedur pencarian terstruktur dan sintesis tematik. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, audit trail, dan member-checking; aspek etika dipenuhi melalui informed consent dan anonimisasi. **Temuan menunjukkan** bahwa Pancasila berpotensi besar dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan beradab, tetapi norma normatif saja tidak cukup: internalisasi nilai efektif bila didukung kapasitas guru, materi ajar kontekstual, dan metode pembelajaran partisipatif, namun implementasi di lapangan sering terfragmentasi akibat keterbatasan kurikulum, kurangnya materi lokal, dan

ketergantungan pada inisiatif individual. Di ranah kebijakan, ketidakharmonisan antara hukum adat dan hukum nasional, birokrasi yang kurang responsif, lemahnya penegakan hukum, dan minimnya partisipasi

---

**Kata Kunci:** Pancasila, UUD 1945, Partisipasi Masyarakat

**Abstract:** Pancasila serves a dual function as the foundation of the state and a moral guide that shapes social interactions in Indonesia, reflecting the nation's cultural, social, and political values. Although ideally it should be the basis for educational policies and practices, the application of Pancasila values faces increasing obstacles due to social, economic, and political polarization; the 2023 BPS survey shows that only 45% of respondents reported applying Pancasila principles in their daily lives, indicating a gap between idealism and practice. **This research employs a descriptive qualitative approach with a multiple case study design:** in-depth interviews conducted from July to August with seven purposive informants (academics, government practitioners, educators, community leaders, students) analyzed thematically, as well as a Systematic Literature Review (SLR) from 2020 to 2025 carried out with structured search procedures and thematic synthesis. Data validity is strengthened thru source triangulation, audit trails, and member checking; ethical aspects are fulfilled thru informed consent and anonymization. **The findings** indicate that Pancasila has great potential in building a just, prosperous, and civilized society, but normative norms alone are not enough: the effective internalization of values is supported by teacher capacity, contextual teaching materials, and participatory learning methods. However, implementation on the ground is often fragmented due to curriculum limitations, lack of local materials, and dependence on individual initiatives. In the realm of policy, the disharmony between customary law and national law, unresponsive bureaucracy, weak law enforcement, and minimal participation

---

**Keywords:** Pancasila, 1945 Constitution, Community Participation

## A. Pendahuluan

Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara Indonesia, tetapi juga sebagai pedoman moral dalam kehidupan berbangsa (Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Aisha Arista Widiya, et al., 2024). Dalam situasi seperti ini, Pancasila berfungsi sebagai bukan hanya landasan hukum tetapi juga sebagai filosofi yang mengajarkan bagaimana orang berinteraksi dan berperilaku secara sosial. Pancasila terdiri dari nilai-nilai dasar yang mencerminkan sifat budaya, sosial, dan politik Indonesia (Unggul et al., 2020). Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ada lebih banyak hambatan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama di masyarakat yang terbelah oleh berbagai kepentingan sosial, ekonomi, dan politik. Sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2023 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan bahwa hanya 45% orang yang mengatakan bahwa mereka terus menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka (Alfikro, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara realitas sosial yang dihadapi orang-orang dan idealisme Pancasila.

Penelitian terkini menunjukkan bahwa peningkatan intoleransi dan perpecahan sosial terjadi seiring dengan penurunan pemahaman terhadap prinsip-prinsip Pancasila (Irgi Iqbal, 2024). Sebuah studi yang dipublikasikan pada tahun 2022 dalam *Journal of Social and Humanities* mengungkapkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai Pancasila berkontribusi terhadap munculnya konflik sosial dan tindakan diskriminatif. Selain itu, riset yang dilakukan oleh Universitas Indonesia pada tahun 2021 menemukan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan formal belum optimal, sehingga generasi muda tidak memiliki dasar yang kuat untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai tersebut (Tirtoni, 2022). Mempertahankan integritas dan

pelaksanaan Pancasila di tengah dinamika globalisasi dan arus informasi yang cepat semakin sulit. Situasi ini menjadi lebih buruk karena perubahan sosial yang cepat, pengaruh budaya asing, dan individualisme yang meningkat.

Dalam situasi seperti ini, filosofi UUD 1945 memberikan dasar hukum yang kuat untuk mendukung prinsip-prinsip Pancasila (Hasan et al., 2024). UUD 1945 tidak hanya mengatur elemen pemerintahan, tetapi juga mengandung nilai-nilai Pancasila, seperti persatuan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempelajari cara-cara di mana prinsip-prinsip filosofi yang terkandung dalam Konstitusi 1945 dapat dihidupkan kembali dalam kehidupan nasional (Uud et al., 2016). Metode ini diharapkan dapat membuat orang merasa relevan dengan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka, terutama ketika mereka menghadapi masalah sosial yang ada. Jika UUD 1945 dilaksanakan dengan benar, ini dapat menjadi penguat untuk upaya revitalisasi Pancasila di berbagai bidang, seperti pendidikan, ekonomi, dan budaya (Yunas et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat implementasi nilai-nilai Pancasila serta mengeksplorasi strategi untuk menghidupkan kembali nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa. Dengan memahami hambatan-hambatan utama yang dihadapi dalam penerapan Pancasila, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konstruktif bagi pemerintah, pendidik, dan masyarakat dalam memperkuat fondasi moral bangsa. Pancasila berfungsi sebagai bukan hanya dasar negara tetapi juga sebagai standar moral yang mengatur interaksi, kebijakan publik, dan praktik pendidikan di Indonesia (Atqiya et al., 2024). Tetapi bukti empiris baru-baru ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara prinsip normatif Pancasila dan praktik sosial. Ini terlihat dalam survei nasional yang menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila kurang diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari dan bahwa ada lebih banyak indikator fragmentasi sosial dan intoleransi (Agus Tina Wulandari et al., 2025). Di bidang hukum dan kebijakan, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa ada beberapa masalah untuk menerapkan Pancasila. Ini termasuk penegakan hukum yang lemah, ketidaksesuaian antara hukum adat dan hukum nasional, dan interpretasi nilai yang berbeda di birokrasi (Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Dini Agustin Rahmawati, et al., 2024). Dalam pendidikan, penelitian menunjukkan bahwa upaya untuk mengintegrasikan nilai Pancasila ke dalam kurikulum dan metode pembelajaran masih menghadapi tantangan dalam hal efektivitas intervensi dan kesinambungan praktik (Qari et al., 2024).

Tinjauan pustaka yang lebih khusus menampilkan beberapa tema penelitian yang relevan tetapi masih terfragmentasi. Pertama, meskipun terdapat studi tentang pendidikan karakter yang didasarkan pada Pancasila, tidak banyak studi empiris yang menguji bagaimana filosofi UUD 1945 diimplementasikan dalam kebijakan publik (Manan, 2006). Kedua, meskipun terdapat studi tentang pendidikan karakter yang didasarkan pada Pancasila, tidak banyak bukti mengenai seberapa efektif pendekatan pedagogis kontekstual dan mekanisme untuk meningkatkan partisipasi generasi muda dalam program pemerintah. Ketiga, penelitian tentang hambatan (Farikiansyah et al., 2024). implementasi, seperti kapasitas aparatur pemerintah, resistensi politik lokal, dan dampak globalisasi dan teknologi, sering dibahas secara terpisah tanpa menggabungkan semua pemangku kepentingan (Olivia et al., 2025).

Menurut penelitian literatur tersebut, terdapat perbedaan yang jelas dalam penelitian. Pertama, penelitian yang sangat kecil menggabungkan perspektif dari berbagai pihak yang terlibat (praktisi pemerintah, pendidik, tokoh masyarakat, akademisi, dan generasi muda) untuk mengevaluasi tantangan dan peluang untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Kedua, intervensi pendidikan yang berbasis bukti dan rekomendasi

kebijakan masih jarang menggunakan wawancara tematik dan metode kualitatif lapangan lainnya. Ketiga, masih diperlukan penelitian empiris yang lebih mendalam tentang peran aparatur dan dinamika partisipasi publik. Ini terutama terkait dengan keterlibatan generasi muda dan internalisasi nilai melalui media dan teknologi. Untuk mengatasi perbedaan ini, penelitian ini memiliki tujuan yang digariskan secara jelas sebagai berikut: mengidentifikasi dan memeriksa tantangan utama dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dan filosofi UUD 1945 dalam kebijakan publik dan praktik pendidikan. mengevaluasi bagaimana pendidikan, kemampuan staf, dan faktor eksternal seperti globalisasi dan teknologi berkontribusi pada penyerapan nilai-nilai Pancasila. untuk membuat strategi intervensi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan efektivitas kebijakan berbasis Pancasila dengan menggabungkan bukti dari wawancara multi-stakeholder dan SLR.

Tiga elemen menunjukkan sifat inovatif dan inovatif penelitian ini. Pertama, secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan SLR dan wawancara mendalam dengan banyak informan untuk menghasilkan sintesis teoritis dan praktis yang menyeluruh. Ini adalah kombinasi yang masih jarang dalam studi Pancasila modern. Kedua, substantif: penelitian ini berfokus pada hubungan langsung antara filosofi UUD 1945 dan praktik pendidikan dan kebijakan melalui lensa multi-stakeholder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan saran kebijakan yang kontekstual dan dapat diterapkan. Ketiga, aplikatif: penelitian telah menghasilkan strategi multi-sektor yang berfokus pada kapasitas aparatur dan partisipasi generasi muda. Kedua faktor ini dianggap sebagai penghambat penting dalam literatur saat ini, tetapi kurang mendapat perhatian empiris.

## B. Metode Penelitian

Untuk menyelidiki bagaimana filosofi UUD 1945 menghidupkan nilai Pancasila dalam kebijakan, pendidikan, dan partisipasi publik, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus multipel. Tujuh informan utama—dua akademisi, satu praktisi pemerintah, satu pendidik, satu tokoh masyarakat, dan dua mahasiswa—dipilih secara acak berdasarkan keterlibatan mereka dalam masalah dan variabel lokal. Wawancara dilakukan pada bulan Agustus dan direkam dan ditranskrip verbatim. Untuk mendapatkan data sekunder.

**Tabel 1 Informan**

Nama/Inisial	Profesi/Jabatan	Latar belakang Pendidikan	Peran dalam Penelitian	Wilayah/ Asal
OZ	Akademisi	S2	Sumber Informasi	Aceh
RND	Praktisi Pemerintah	S2	Pandangan Kebijakan	Bandung
YN	Pendidik	S1	Persepektif Pendidikan	Yogyakarta
DK	Tokoh Masyarakat	SMA	Representasi Masyarakat	Yogyakarta
NS	Mahasiswa	S1	Suara Generasi Muda	Medan
AZM	Akademisi	S3	Analisis Teoritis	Kebumen
LN	Mahasiswa	S1	Persepektif Fresh	Yogyakarta

Systematic Literature Review (SLR) dilakukan terhadap literatur yang relevan dari tahun 2020–2025. SLR menggunakan prosedur pencarian terstruktur, kriteria inklusi atau eksklusif, ekstraksi data, dan sintesis tematik., analisis wawancara mengikuti prosedur analisis tematik (familiarisasi, pengkodean, pengelompokan tema, dan triangulasi antar-informan).

KRETERIA INKLUSI DAN EKSLUSI Do's & Don'ts	
<p>✓ <b>DO'S</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jurnal yang terbit 2020-2025</li> <li>Jurnal teks lengkap</li> <li>Jurnal berisi kata kunci</li> <li>Pancasila, Kebijakan Publik, Implementasi Pancasila, pendidikan, Nilai-Nilai Pancasila, partisipasi masyarakat, UUD 1945, Kebijakan sosial, Pendidikan Pancasila, metode pembelajaran</li> </ul>	<p>✗ <b>DON'TS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jurnal yang terbit diluar tahun 2020-2025</li> <li>Jurnal teks tidak lengkap</li> <li>Jurnal tidak berisi kata kunci</li> <li>Yang bukan tentang Pancasila, Kebijakan Publik, Implementasi Pancasila, pendidikan, Nilai-Nilai Pancasila, partisipasi masyarakat, UUD 1945, kebijakan sosial, Pendidikan Pancasila, metode pembelajaran</li> </ul>

**Gambar 1 Kriteria Inklusi dan Ekskusi**

Selain itu, hasil analisis tematik disintesis dengan temuan SLR untuk membuat saran berbasis bukti. Justifikasi metode: temuan dapat dimasukkan ke dalam bukti literatur yang lebih luas untuk tujuan eksploratori dan perumusan kebijakan berkat kombinasi wawancara multi-informan dan SLR. Validitas dilakukan melalui audit trail, triangulasi sumber, dan pengawasan anggota; unsur etika dipenuhi melalui informed consent dan anonimisasi. Dimaksudkan untuk menghindari generalisasi kuantitatif, membatasi cakupan SLR dari 2020–2025, dan mengurangi kemungkinan bias respons sosial melalui triangulasi dan pertanyaan terbuka karena jumlah informan yang terbatas (n=7).

### C. Hasil Dan Pembahasan

Penelitian ini akan menyajikan hasil dan diskusi berdasarkan wawancara mendalam dengan informan kunci yang terlibat dalam studi ini. Tujuan dari wawancara tersebut adalah untuk menggali pengetahuan, pengalaman, dan pandangan informan mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila serta filosofi Undang-Undang Dasar 1945 dalam kebijakan publik, pendidikan, dan isu sosial yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini. Analisis tematik yang mengintegrasikan perspektif dari berbagai latar belakang pendidikan dan profesi akan digunakan untuk menyajikan hasil wawancara. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila dan filosofi Undang-Undang Dasar 1945 dapat dihidupkan kembali, serta langkah konkret yang dapat diambil oleh masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan. Selain itu, setiap informan akan memberikan kontribusi unik yang diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi berbagai pihak untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 di tengah tantangan yang dihadapi saat ini. Mari kita lihat hasil wawancara.

Apa kendala utama yang dihadapi dalam memasukkan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945 ke dalam kebijakan publik? OZ (Akademisi, S2, Aceh): "Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan adalah salah satu masalah utama. Banyak kebijakan dibuat tanpa meminta suara masyarakat, yang seharusnya menjadi tujuan utama mereka. Hal ini seringkali menghasilkan kebijakan yang tidak relevan atau tidak memenuhi kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Selain itu, memahami nilai-nilai Pancasila itu sendiri tidak selalu mudah. Banyak pegawai pemerintah yang tidak memahami dasar-dasar Pancasila, sehingga mereka tidak dapat mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam kebijakan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dibuat tidak mencapai keadilan sosial yang diharapkan" RND (Praktisi Pemerintah, S2, Bandung): "Adanya resistensi terhadap perubahan adalah tantangan tambahan. Kebijakan saat ini biasanya dianggap "aman", dan tidak ada dorongan untuk berinovasi. Selain itu, dinamika politik seringkali menghalangi pelaksanaan prinsip-prinsip Pancasila, di mana kepentingan politik tertentu lebih penting daripada kepentingan umum masyarakat. Oleh karena itu,

sangat penting bagi pegawai pemerintah dan masyarakat untuk memahami betapa pentingnya nilai-nilai Pancasila didasarkan pada setiap kebijakan.”

Bagaimana pendidikan dapat membantu mengatasi masalah tersebut? YN (Pendidik, S1, Yogyakarta): "Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila." Memperkenalkan ide partisipasi aktif sejak dini adalah salah satu cara. Siswa dapat belajar tentang pentingnya suara mereka dalam masyarakat melalui proyek komunitas yang melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Jika siswa dididik untuk berpartisipasi dalam forum diskusi atau kegiatan sosial, mereka akan menjadi orang yang tidak hanya memahami nilai-nilai Pancasila, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kurikulum harus disesuaikan untuk mengajarkan Pancasila dalam konteks lokal sehingga siswa dapat memahami relevansinya.”

AZM (Akademisi, S3, Kebumen): “Saya percaya bahwa metode pengajaran yang interaktif dan berbasis pengalaman dapat sangat memperkuat pemahaman siswa tentang nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengadakan diskusi kelompok tentang masalah sosial yang sedang terjadi di masyarakat di kelas, misalnya. Metode ini mengajarkan siswa tidak hanya teori tetapi juga keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Pengabdian masyarakat dan proyek sosial lainnya di sekolah juga bisa menjadi cara bagi siswa untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, sehingga mereka tidak hanya memahami, tetapi juga merasakan dampak positif dari nilai-nilai tersebut.”

Apa saran konkret yang dapat dibuat untuk mendukung prinsip-prinsip Pancasila di masyarakat? "Saya pikir pemerintah harus lebih proaktif dalam mengadakan program dialog antarwarga yang berbasis nilai-nilai Pancasila." Ini dapat berupa diskusi terbuka di mana orang-orang dapat menyampaikan pendapat dan keinginan mereka. Masyarakat akan merasa terlibat dan penting dalam proses pengambilan keputusan karena hal ini. Pemerintah dapat menjalin kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menyelenggarakan program pendidikan yang menekankan pada pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Melalui kolaborasi ini, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami esensi Pancasila dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Upaya tersebut tidak hanya akan memperdalam pemahaman masyarakat, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan persatuan di tengah keberagaman sosial. Kemitraan antara pemerintah dan LSM dalam bidang pendidikan memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pemahaman nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat. Dengan demikian, kolaborasi ini menjadi strategi penting dalam memperkuat ideologi negara dan membangun masyarakat yang lebih harmonis dan berkeadilan.”

NS (siswa S1 di Medan): "Generasi muda harus terlibat dalam berbagai organisasi yang mempromosikan prinsip Pancasila. Misalnya, mereka dapat menggunakan kegiatan sosial di kampus atau komunitas lokal yang berfokus pada pengabdian masyarakat sebagai wadah untuk berkontribusi. Perlu ada kampanye yang lebih aktif dari pemerintah dan organisasi masyarakat untuk mengajak generasi muda untuk berpartisipasi dalam program-program yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan tersebut. Selain itu, generasi muda tidak hanya akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila, tetapi juga akan merasakan dampaknya dalam kehidupan sosial.”

Bagaimana pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk menghidupkan nilai-nilai Pancasila? LN (mahasiswa S1 di Yogyakarta): "Saya melihat pentingnya adanya saling dukung antara masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan program-program yang mempromosikan nilai-nilai Pancasila." Melalui forum-forum terbuka, di mana aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat didengar, masyarakat dapat memberikan masukan

langsung kepada pemerintah. Sementara itu, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mengikuti masukan tersebut. Pemerintah harus siap untuk menanggapi dan menerapkan permintaan masyarakat untuk program pendidikan yang lebih menekankan prinsip-prinsip Pancasila. Sinergi yang kuat akan tercipta melalui kerja sama ini dan memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila benar-benar dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari.”

Hasil wawancara dengan berbagai informan memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945 diterapkan dalam kebijakan publik, pendidikan, dan partisipasi masyarakat. Salah satu hambatan utama untuk memasukkan prinsip-prinsip Pancasila ke dalam kebijakan publik adalah partisipasi masyarakat yang rendah. Banyak kebijakan dibuat tanpa meminta pendapat masyarakat, sehingga menghasilkan hasil yang tidak relevan dan tidak memenuhi kebutuhan nyata. Selain itu, pegawai pemerintah kurang memahami Pancasila, yang menghambat penerapan prinsip-prinsip tersebut. Selain itu, menjadi tahan terhadap perubahan dan dinamika politik yang sering mengutamakan kepentingan tertentu merupakan masalah besar.

Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk karakter masyarakat dan pemahaman mereka tentang Pancasila. Siswa dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan menanamkan gagasan partisipasi aktif dan menggunakan pendekatan pembelajaran interaktif. Proyek sosial dan pengabdian masyarakat juga menjadi sarana yang efektif untuk menginternalisasi nilai-nilai tersebut.

Pentingnya kolaborasi antara sektor pendidikan, masyarakat, dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sangatlah krusial. Sinergi antara ketiga elemen tersebut diperlukan untuk mencapai tujuan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Melalui kerjasama yang efektif, nilai-nilai tersebut dapat dihidupkan kembali dan diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, kolaborasi ini menjadi fondasi untuk membangun masyarakat yang lebih harmonis, adil, dan sejahtera.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR). SLR ini berfokus pada artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2020 dan 2025. Tujuan SLR ini adalah untuk menemukan tren penelitian terbaru, praktik terbaik, dan inovasi yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila. Melalui analisis sepuluh artikel jurnal ilmiah terpilih, SLR ini akan memberikan gambaran yang di harapkan bahwa hasil wawancara dan hasil SLR dapat digabungkan untuk mendukung kebijakan dan program yang lebih baik untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila di Indonesia. "

Sepuluh artikel jurnal yang relevan dengan topik penelitian ini dapat menggunakan kata kunci berikut "Pancasila" AND "kebijakan publik", "Implementasi Pancasila" AND "pendidikan", "Nilai-nilai Pancasila" AND "partisipasi masyarakat","UUD 1945" AND "kebijakan sosial", "Pendidikan Pancasila" AND "metode pembelajaran".

Untuk mencari artikel di database seperti Google Scholar, Scopus, atau Web of Science:

No	Judul Artikel	Penulis	Tahun	Jurnal	Temuan
1	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam suatu Pembelajaran Kewarganegaraan: Kajian Kualitatif	Bambang Murdiansyah, dan Eko Ali, Muh Hariyadi, Slamet	2025	Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, dan Inovasi	Hasil menunjukkan bahwa siswa lebih terlibat dan memahami nilai-nilai Pancasila. Pengembangan kemampuan guru, penyediaan bahan ajar kontekstual, dan penggunaan teknologi adalah semua faktor yang berkontribusi pada keberhasilan pembelajaran ini. Hasilnya menunjukkan

No	Judul Artikel	Penulis	Tahun	Jurnal	Temuan
	Deskriptif di Sekolah Menengah				bahwa model pembelajaran PKn berbasis nilai dapat digunakan untuk pendidikan karakter di Indonesia. Model ini menegaskan betapa pentingnya menggunakan pendekatan kontekstual dan partisipatif untuk internalisasi nilai kebangsaan(Bambang Murdiansyah et al., 2025).
2	Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional	Kurdi Arbani, dalam Muhammad	2024	Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)	Studi ini menyelidiki bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam sistem hukum Indonesia dan menemukan masalah seperti ketidaksesuaian dengan hukum adat dan lemahnya penegakan hukum. Hasilnya menunjukkan bahwa Pancasila memainkan peran penting dalam membangun sistem hukum yang adil. Agar integrasi nilai-nilai Pancasila menjadi efektif dan relevan, reformasi hukum, dialog lintas sektor, pendidikan hukum, dan keterlibatan masyarakat diperlukan(Kurdi & Arbani, 2024).
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Indonesia	Firdaus, Amanda Dewi, Dinie Anggraenie	2024	Jurnal Kewarganegaraan	Sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh pendidikan. Akibatnya, pendidikan di Indonesia harus ditingkatkan. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang sebenarnya, sistem pendidikan dalam metode belajar mengajar harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Ini akan menghasilkan moral anak bangsa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila(Firdaus & Dewi, 2021).
4	Implementasi Nilai Pancasila dalam Pembentukan Undang-Undang	Frensiska Ardhiyaningrum	2024	Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum	: Studi ini menunjukkan betapa pentingnya menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam pembuatan hukum Indonesia. Pancasila, yang merupakan dasar negara, berfungsi sebagai pedoman untuk undang-undang yang berprinsip moral. Studi ini menemukan bahwa nilai-nilai seperti keadilan sosial, persatuan, dan musyawarah seringkali tidak konsisten dalam peraturan, yang berdampak pada politik dan ekonomi. Diidentifikasi bahwa ada hambatan untuk memasukkan prinsip-prinsip Pancasila ke dalam kebijakan publik dan diusulkan metode untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses legislatif dengan tujuan meningkatkan keadilan sosial dan mencerminkan aspirasi masyarakat(Frensiska Ardhiyaningrum, 2024).
5	GOVERNANCE: Jurnal Kajian Lokal dan Pembangunan REAKTUALISASI PANCASILA	Balya, Humam Politik dan	2024	GOVERAN CE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan	Studi menunjukkan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar filosofis hukum nasional Indonesia, dan nilai-nilainya diterapkan dalam pembentukan undang-undang, keputusan pengadilan, dan kebijakan hukum. Tapi implementasi ini menghadapi masalah seperti interpretasi

No	Judul Artikel	Penulis	Tahun	Jurnal	Temuan
	SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS HUKUM NASIONAL				yang beragam dan inkonsistensi praktik. Untuk membentuk masyarakat yang adil, makmur, dan bersatu, penting untuk memprioritaskan nilai-nilai Pancasila agar hukum tidak hanya sah secara hukum tetapi juga moral dan sesuai dengan budaya masyarakat. Selain itu, harmonisasi kebijakan hukum dan pendidikan yang berkelanjutan sangat penting(Balya, 2024).
6	Menghidupkan Kembali Semangat Hidup Berpancasila di Era Milenial	Wou, Maria Felsita Eno Nono, Ruda, Maria Belcia Ye, Klementian Bhoko, Florentina Dasilfa Bhoko, Maria Bergita	2025	Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Filsafat	Hasil dari abstrak penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk melihat bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan di era milenial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghidupkan kembali semangat Pancasila di kalangan generasi milenial. Studi ini menekankan betapa pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kontemporer(Wou et al., 2025).
7	Penerapan Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia	Zainudin Hasan Fathaniah Ghaisani Putri Cinta Jivara Riani Amanda Putri Evandra	2024	Perkara Jurnal Hukum Politik	:Penelitian menunjukkan bahwa Pancasila adalah fondasi moral dan hukum bangsa dan Indonesia yang penting untuk mewujudkan keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial. Dalam semua aspek kehidupan, Pancasila harus tetap kuat dan berfungsi sebagai sumber tertinggi hukum negara. Setiap produk hukum harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, meskipun implementasinya menghadapi kesulitan seperti interpretasi yang beragam. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan kembali peran Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dan menekankan betapa pentingnya masyarakat berpartisipasi dalam pembuatan hukum(Zainudin Hasan et al., 2024).
8	Pentingnya Penanaman Pancasila sebagai Sumber dalam Kehidupan Bermasyarakat	Ranuasa, Nilai Gunawan Tumbio, Resdiadi The Amin, Importance of Rahmat Instilling Pancasila Saripudin, Values as a Source of Law in Community Life	2024	Jurnal Kolaboratif Sains	Studi menunjukkan bahwa Pancasila adalah dasar hukum dan sumber negara Indonesia. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab, diperlukan penerapan nilai-nilai Pancasila. Internalisasi prinsip-prinsip ini dapat menghasilkan harmoni dan keadilan sosial. Jika diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, hal ini dapat berdampak pada stabilitas sosial dan hukum. Selain itu, artikel ini menawarkan pedoman untuk menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kebijakan publik dan kehidupan sehari-hari(Ranuasa et al., 2024).
9	Membangun Karakter Sekolah Melalui Nilai Pancasila	Yolanda Siswa Veliani Dasar Pratama Nilai - Ari Suriani Nilai Pancasila	2025	Jurnal Sadewa : Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran	Studi menunjukkan bahwa kolaborasi sekolah-keluarga, pembelajaran berbasis proyek, media digital interaktif, dan toleransi, serta nilai-nilai keadilan sosial, dapat mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila.

No	Judul Artikel	Penulis	Tahun	Jurnal	Temuan
	Dalam Pendidikan: Studi Literatur			dan Ilmu Sosial	Namun, konten digital yang tidak terfilter dan perbedaan antara lingkungan rumah dan sekolah menimbulkan masalah. Untuk meningkatkan pendidikan karakter berbasis Pancasila di tingkat pendidikan dasar, diperlukan pendekatan yang mencakup semua aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Pendekatan ini juga harus mencakup strategi yang inventif dan kontekstual(Yolanda Veliani Pratama & Ari Suriani, 2025).
10	Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Hukum Analisis Kesesuaian dan Kontemporer	Muhamad, Ahmad, Nasoha, Musain, Alfiani, Laila Safira, Eka Rahmadani, Azzahra Meisya, Rohmah, Zidni Aulia	2025	Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora	Studi menunjukkan bahwa Pancasila sebagai dasar hukum Indonesia mewakili prinsip demokrasi dan keadilan. Meskipun diakui, hukum adat menghadapi kesulitan untuk selaras dengan hukum nasional. Untuk memperkuat keadilan dan melindungi komunitas adat, hukum adat harus diintegrasikan dengan sistem hukum yang dipandu Pancasila. Untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan, reformasi hukum yang responsif juga penting(Hukum et al., 2025).

Hasil penelitian menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila memiliki peran penting baik dalam sistem pendidikan maupun sistem hukum negara dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Namun, analisis tematik menunjukkan bahwa tidak ada aturan yang otomatis menjamin implementasi; ada perbedaan antara prinsip filosofis yang tercantum dalam UUD 1945 dan praktik sehari-hari di institusi pendidikan dan organisasi publik. Karena temuan penelitian menunjukkan sumber hambatan struktural, institusional, dan kultural, hubungan ini langsung dengan pertanyaan penelitian—mengidentifikasi hambatan implementasi dan strategi revitalisasi.

Hasil wawancara dan sintesis SLR dalam bidang pendidikan menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis nilai Pancasila dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan pemahaman konseptual mereka jika didukung oleh kemampuan guru dan materi kontekstual. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menekankan bahwa guru harus dilatih dan bahwa kurikulum sangat penting untuk internalisasi nilai. Data lapangan, bagaimanapun, berbeda dengan klaim normatif yang sering mendorong penerapan cepat, menekankan masalah praktis seperti jam pelajaran yang terbatas, kurikulum yang padat, dan kurangnya materi pelajaran lokal yang relevan. Akibatnya, program berbasis nilai seringkali bergantung pada inisiatif pribadi guru atau bersifat proyek-segmental, sehingga internalisasi nilai terus-menerus menjadi terfragmentasi. Hasil metodologis ini mempertegas nilai metodologi studi kasus multipel: wawancara dengan banyak informan, daripada hanya menggunakan data kuantitatif, mampu mengidentifikasi variasi praktik antarsekolah dan wilayah yang tidak terlihat.

Studi menunjukkan bahwa, pada tingkat hukum dan kebijakan publik, ada konflik antara prinsip Pancasila sebagai dasar filosofis dan praktik hukum lokal. Pancasila sebagai

sumber normatif kebijakan menjadi kurang efektif karena birokrasi yang tidak responsif, ketidaksesuaian antara hukum adat dan hukum nasional, dan lemahnya penegakan hukum. Bukti empiris sebelumnya tentang hambatan institusional dan politis diperkuat oleh temuan ini misalnya, (Kurdi & Arbani, 2024). Selain itu, temuan wawancara menunjukkan bahwa legitimasi peraturan dikurangi oleh proses pembuatan kebijakan yang minim partisipasi publik. Kesimpulan ini relevan dengan pertanyaan penelitian karena menunjukkan bahwa revitalisasi Pancasila tidak hanya memerlukan perubahan standar, tetapi juga reformasi proses (keadilan proses) agar kebijakan mencerminkan nilai keadilan sosial dan aspirasi masyarakat.

Selain itu, analisis menekankan bahwa aktor-aktor berikut berperan dalam perubahan penting: guru yang terlatih, pejabat negara yang mampu, figur masyarakat, dan generasi muda. Internalisasi nilai adalah proses sosial yang lebih dari sekedar transfer pengetahuan. Ini memerlukan model pembelajaran partisipatif, ruang diskusi publik, dan media digital yang ditujukan untuk pendidikan nilai. Dalam kenyataannya, hal ini membutuhkan intervensi dari berbagai sektor. Ini termasuk pelatihan terus-menerus bagi pendidik dan staf, pembuatan materi ajar kontekstual (seperti studi kasus lokal yang menganalisis sila Pancasila dengan masalah lokal), dan mekanisme untuk melibatkan masyarakat dalam pembentukan aturan lokal.

Kombinasi bukti lapangan multiinforman dan SLR adalah kekuatan studi ini. Ini memungkinkan triangulasi hasil dan membuat saran yang terintegrasi antara bukti literatur dan empirisisme lokal. Metodologi kualitatif memberi keuntungan dalam memetakan proses dan nuansa sosial yang sering terlewatkan dalam survei besar. Ini adalah keuntungan dalam kasus di mana tujuan penelitian adalah untuk membuat rekomendasi kontekstual. Namun, temuan harus dibaca dengan hati-hati: sampel kecil ( $n=7$ ) dan pemilihan purposive membatasi generalisasi; cakupan SLR 2020–2025 mengurangi perspektif historis; dan, meskipun diminimalkan melalui triangulasi dan checking member, bias respons masih ada. Secara konseptual, penelitian ini juga berisiko menekankan solusi teknis (pelatihan dan materi) tanpa menyelidiki perubahan struktural yang lebih dalam dalam jangka panjang. Ini adalah batasan yang memerlukan penelitian lebih lanjut.

Hasil dapat digunakan untuk merumuskan implikasi praktik dan kebijakan yang lebih spesifik. Di sektor pendidikan, (1) kurikulum harus memungkinkan pendidikan nilai untuk dimasukkan ke dalamnya (misalnya, modul terstruktur tentang penerapan sila dalam studi kasus lokal); (2) pemerintah daerah dan dinas pendidikan harus memiliki program pelatihan berkelanjutan yang berkaitan dengan evaluasi kinerja nilai, bukan hanya kualifikasi akademik guru; dan (3) pengembangan materi digital yang terkurasi yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan berpartisipasi. Di tingkat kebijakan publik, (1) forum mediasi yang melibatkan akademisi, tokoh adat, dan pembuat kebijakan harus didirikan untuk memfasilitasi proses harmonisasi hukum adat dan nasional; (2) proses legislasi harus diperbaiki agar lebih partisipatif, seperti melalui konsultasi publik yang terdokumentasi dan responsif; dan (3) penguatan penegakan hukum harus disertai dengan transparansi dan akuntabilitas untuk memulihkan kepercayaan publik.

Rekomendasi metodologis untuk penelitian lanjutan meliputi studi komparatif lintas daerah dengan sampel lebih besar untuk menguji hasil generalisasi; studi kuasi-eksperimental untuk mengevaluasi seberapa efektif intervensi pendidikan berbasis Pancasila; dan studi longitudinal untuk mengevaluasi seberapa konsisten internalisasi nilai pada generasi muda. Selain itu, melakukan penelitian kualitatif mendalam di komunitas adat dapat membantu mendapatkan pemahaman historis yang mengevaluasi bagaimana prinsip Pancasila berinteraksi dengan kebiasaan lokal dalam jangka panjang.

Singkatnya, menghidupkan kembali prinsip filosofis UUD 1945 memerlukan perubahan institusional, penguatan kapasitas aktor utama, dan desain intervensi pendidikan yang kontekstual dan partisipatif. Sesuai dengan tujuan penelitian untuk menghasilkan rekomendasi bermanfaat bagi pemerintah, pendidik, dan masyarakat, studi ini memperkuat argumen bahwa pendekatan efektif harus bersifat multisektor dan berkelanjutan, menggabungkan perbaikan prosedural dalam legislasi dengan praktik pendidikan yang melibatkan masyarakat luas.

#### D. Kesimpulan dan Implikasi

Studi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Namun, ada hambatan struktural, institusional, dan kultural, seperti kurikulum yang terbatas, materi lokal yang kurang, ketidakharmonisan hukum adat-nasional, penegakan yang lemah, dan kurangnya partisipasi publik. Studi menunjukkan bahwa internalisasi nilai efektif jika didukung oleh keterampilan guru, materi kontekstual, dan metode partisipatif; namun, internalisasi nilai sering terjadi secara bertahap tanpa dukungan sistemik. Dengan menggunakan studi kasus multipel yang disintesis dengan SLR, penelitian ini berusaha menjembatani perbedaan antara teori normatif Pancasila dan praktik implementasinya. Studi komparatif lintas daerah, evaluasi kuasi eksperimental intervensi pendidikan berbasis Pancasila, penelitian jangka panjang untuk mengevaluasi kesinambungan internalisasi, dan penelitian kualitatif mendalam pada komunitas adat untuk memperkaya perspektif historis adalah beberapa contoh tindakan yang dapat dilakukan.

#### Daftar Pustaka

- Agus Tina Wulandari, Sarah Angelina Panggabean, Furqon Mubarak, & Herli Antoni. (2025). Efektivitas Pendidikan Pancasila Bagi Generasi Z Dalam Mencegah Disintegrasi Sosial Di Era Digitalisasi. *Journal of Student Research*, 3(3), 16–26. <https://doi.org/10.55606/jsr.v3i1.3585>
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Aisha Arista Widiya, Rismaya Wulandari, Riski Muhamad Sholeh Triatmojo, & Ardiyan Nugraheni. (2024). Peran Pancasila sebagai Pedoman Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam Dinamika Sejarah dan Perkembangannya. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 2(4), 379–395. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i4.1379>
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Dini Agustin Rahmawati, Zahwa Luthfi'a Az-zahra, & Nadia Shafira. (2024). Integrasi Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Konstitusi Indonesia: Implikasi terhadap Perlindungan Hukum Adat. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(4), 47–59. <https://doi.org/10.62383/progres.v1i4.931>
- Alfikro, A. (2023). Analisis Keabsahan Pengawasan Ketenagakerjaan Menurut UU No. 13 Tahun 2003 dalam Pemenuhan Hak Pekerja Disabilitas dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia. *Gema Keadilan*, 10(1), 35–50. <https://doi.org/10.14710/gk.2023.20250>
- Atqiya, A. ., Nasoha, A. M. ., Ummu, R. P. ., Natasyah, R. ., & Darrohmah, S. . (2024). Pancasila Sebagai Sistem Etika , Etika Kehidupan Berbangsa , dan Perlunya Pancasila sebagai Sistem Etika Pascasarjana Universitas Sebelas Maret , Indonesia Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret , Indonesia Universitas Islam Negeri Raden Mas. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara Volume. 1, Nomor. 4 Tahun 2024*, 1, 7.
- Balya, H. (2024). GOVERNANCE: *Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan REAKTUALISASI PANCASILA SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS HUKUM*

- NASIONAL. 11(September), 88-95.
- Bambang Murdiansyah, E., Ali, M., & Hariyadi, S. (2025). *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam Pembelajaran Kewarganegaraan: Kajian Kualitatif Deskriptif di Sekolah Menengah*. 5(3). <https://doi.org/10.59818/jpi.v5i3.1534>
- Farikiansyah, I. M., Salamah, M. N., Rokhimah, A., Ma'rifah, L., Faruq, F. N. F., & Al Gufron, M. A. (2024). Meningkatkan Partisipasi Pemilu melalui Literasi Politik Pemuda Milenial dalam Pendidikan Kewarganegaraan. *Journal of Education Research*, 5(4), 6512-6523. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.793>
- Firdaus, A. R., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 184-191. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1447>
- Frensiska Ardhiyaningrum. (2024). Implementasi Nilai Pancasila Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(4), 259-273. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i4.699>
- Hasan, Z., Majidah, S., Yansah, A., Salsabila, R. F., & Wirantika, M. S. (2024). Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *JIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Research Findings, Literature Review, and Systematic Review*, 2(1), 44-54.
- Hukum, A. J., Humaniora, S., Atqiya, A. N., Muhamad, A., Nasoha, M., Alfiani, L., Safira, E., Rahmadani, A. M., & Rohmah, Z. A. (2025). *Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Adat: Analisis Kesesuaian dan Tantangan Kontemporer Pascasarjana Universitas Sebelas , Indonesia Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret , Indonesia Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Sur. 2*, 1-11.
- Irgi Iqbal, Z. (2024). Pancasila Dalam Perseptif Multikulturalisme Menjaga Kesatuan dan Keragaman. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(4), 690-699.
- Kurdi, & Arbani, M. (2024). Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 8(2), 2674-2681. <https://doi.org/10.36526/santhet.v8i2.4796>
- Manan, A. (2006). *Reformasi Hukum Islam*. 28(3), 270-276.
- Olivia, S., Fitri, S. N., Ikhlas, Z., & Saputra, B. (2025). Menavigasi Kompleksitas Reformasi Administrasi Negara: Tinjauan Literatur Sistematis terhadap Tantangan Implementasi dan Peluang Strategis di Negara Berkembang. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(6), 10931-10938. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Qari, A. R., Yunita, U. T., Nurhaliza, S., & Wati, D. S. (2024). Upaya Integrasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. *JIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 64.
- Ranuasa, T., Gunawan Tumbio, R., Amin, R., Saripudin, A., & Penelitian, A. (2024). Pentingnya Penanaman Nilai Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Kehidupan Bermasyarakat The Importance of Instilling Pancasila Values as a Source of Law in Community Life. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(7), 2321-2327. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i7.5838>
- Tirtoni, F. (2022). Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Karakter Dasar Generasi Muda. *Inventa*, 6(2), 210-224. <https://doi.org/10.36456/inventa.6.2.a6237>
- Unggul, A., Ajati, D., Saputra, R., & Fitriyono, R. (2020). Pancasila Sebagai Dasar Negara. *Pancasila Sebagai Dasar Negara*, 1(Pancasila), 1-12. <http://satujam.com/pancasila-dan-lambangnya/>
- Uud, B., Ri, N., & Kusnadi, A. (2016). *Prinsip-Prinsip Konstitusionalitas Koperasi*. 17-31.
- Wou, M. F. E., Nono, A., Ruda, M. B., Ye, K., Bhoko, F. D., & Bhoko, M. B. (2025).

- Menghidupkan Kembali Semangat Hidup Berpancasila di Era Milenial. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 3(1), 125-138.
- Yolanda Veliani Pratama, & Ari Suriani. (2025). Membangun Karakter Siswa Sekolah Dasar Melalui Nilai - Nilai Pancasila Dalam Pendidikan : Studi Literatur. *Jurnal Sadewa : Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran Dan Ilmu Sosial*, 3(3), 77-87. <https://doi.org/10.61132/sadewa.v3i3.1970>
- Yunas, N. S., Susanti, A., & Izana, N. N. (2023). Kampung Pancasila dan Upaya Membangun Ketahanan Ideologi Pancasila di Era Society 5.0 (Studi Kampung Pancasila Desa Kebonagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang). *Journal of Civics and Moral Studies*, 8(1), 10-20. <https://doi.org/10.26740/jcms.v8n1.p10-20>
- Zainudin Hasan, Fathaniah Ghaisani Putri, Cinta Jivara Riani, & Amanda Putri Evandra. (2024). Penerapan Nilai - Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 138-150. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1863>